

Trade-Off Struktural pada Implementasi Program Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah Provinsi Jawa Timur, Indonesia

Ahmad Rifa'i¹, Arini Sulistyowati^{*2}

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Wijaya Putra, Indonesia

*Email Korespondensi: ariensly80@gmail.com

Abstrak

Program Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur merupakan kebijakan strategis Pemerintah Jawa Timur, diatur melalui Peraturan Gubernur No. 41 dan No. 43 Tahun 2023, untuk memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik kader pesantren, guru madrasah diniyah, dan dosen perguruan tinggi keagamaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas program beasiswa LPPD Jawa Timur serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, menggunakan lima dimensi teori efektivitas program Sutrisno Edi (2007) yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilaksanakan pada September–November 2025 melalui observasi, wawancara mendalam terhadap 12 informan, dan dokumentasi, dianalisis dengan model Miles dan Huberman dan diuji melalui triangulasi. Hasil menunjukkan program secara umum berjalan efektif. Pemahaman program tersosialisasi transparan secara digital. Ketepatan sasaran akurat, ditandai peningkatan penerima dari 461 orang pada 2023 menjadi 685 orang pada 2024 dan 725 orang pada 2025. Tujuan tercapai dan perubahan nyata terlihat dari peningkatan kompetensi lulusan serta kapasitas kepemimpinan keagamaan. Namun, ketepatan waktu masih terkendala administrasi dan penyesuaian jadwal pencairan dana. Faktor pendukung utama meliputi regulasi kuat dan komitmen anggaran daerah. Faktor penghambat mencakup keterbatasan kuota dan kendala administrasi peserta. Penambahan kuota dan penyesuaian jadwal pencairan dana diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program mendatang.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Beasiswa LPPD, Pesantren, Diniyah, Jawa Timur, Pengembangan Pesantren.

Structural Trade-Offs in the Implementation of the East Java Pesantren and Diniyah Development Board Scholarship Program

Abstract

The East Java Province Pesantren and Diniyah Development Board (LPPD) Scholarship Program is a strategic policy of the East Java Provincial Government, established under Governor Regulation No. 41 and No. 43 of 2023, to facilitate the improvement of academic qualifications among pesantren cadres, diniyah teachers, and lecturers at religious higher education institutions. This study aims to analyze the effectiveness of the LPPD East Java scholarship program and identify its supporting and inhibiting factors, using the five dimensions of Sutrisno Edi's (2007) program effectiveness theory, namely program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and tangible change. This descriptive qualitative study was conducted from September to November 2025 through observation, in-depth interviews with 12 informants, and documentation, analyzed using the Miles and Huberman model and validated through triangulation. The findings show that the program has generally run effectively. Program understanding was disseminated transparently through digital media. Target accuracy was high, marked by an increase in recipients from 461 in 2023 to 685 in 2024 and 725 in 2025. Goal achievement and tangible change were evident in improved graduate competencies and enhanced religious leadership capacity. However, timeliness still faced administrative constraints and fund disbursement scheduling issues. Key supporting factors included strong regulation and consistent local budget commitment, while inhibiting factors included limited quotas and applicants' administrative constraints. Increasing quotas and aligning fund disbursement schedules are needed to improve the program's future effectiveness.

Keywords: Program Effectiveness, LPPD Scholarship, Pesantren, Diniyah, East Java, Pesantren Development.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan modal manusia (*human capital*) yang menentukan daya saing dan tingkat kesejahteraan masyarakat (Tawil et al., 2026; Anikina et al. 2015). Studi meta-analisis terhadap 740 estimasi dari 51 penelitian empiris periode 1991 sampai 2023 mengonfirmasi bahwa peningkatan modal manusia berkorelasi positif dengan pertumbuhan output, dengan efek yang jauh lebih kuat pada negara berpendapatan menengah ke bawah seperti Indonesia dibanding negara maju (Teixeira & Gomes, 2026). Temuan ini menegaskan bahwa investasi pendidikan tetap menjadi instrumen kebijakan strategis, terutama pada wilayah dengan populasi lembaga pendidikan keagamaan yang besar seperti Jawa Timur. Di provinsi ini, pesantren dan madrasah diniyah berkedudukan sebagai lembaga pendidikan keagamaan berbasis komunitas yang memiliki fungsi strategis dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas di bidang keagamaan dan karakter (Yugo, 2025). Mengingat besarnya populasi dan entitas pesantren di wilayah ini, peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik dan kadernya menjadi fokus intervensi kebijakan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfasilitasi upaya ini melalui penetapan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, yang menjadi dasar hukum pengalokasian dana hibah Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD). Skema beasiswa afirmatif ini dirancang untuk menjangkau jenjang Strata 1 domestik maupun internasional (Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir), Strata 2, Strata 3, serta Ma'had Aly bagi santri, guru madrasah diniyah, dan dosen perguruan tinggi berbasis pesantren.

Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan komitmen besar terhadap perluasan akses pendidikan, seperti alokasi lebih dari 143 ribu kuota beasiswa dan keringanan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK swasta dan mahasiswa PTS pada 2026 (ANTARA News, 2026), komitmen serupa pada skema afirmatif berbasis pesantren jauh lebih terbatas. Pada Tahun Anggaran 2026, LPPD hanya menyediakan 1.100 kuota beasiswa bagi santri untuk jenjang S1, S2, S3, termasuk program STEM dan Al-Azhar Kairo (Kompas.com, 2026). Secara kumulatif sejak 2019 hingga 2026, LPPD baru memberikan manfaat kepada 7.976 mahasiswa dari 150 PTKIN, PTKIS, Ma'had Aly, dan PTN di Jawa Timur serta Universitas Al-Azhar Kairo (LPPD Jatim, 2026). Dibandingkan dengan populasi pesantren di Jawa Timur yang mencapai ribuan lembaga, kuota tahunan ini menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara alokasi yang disediakan dengan potensi jumlah pendaftar. Keterbatasan kuota ini memicu kompetisi ketat yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan administrasi calon peserta. Banyak calon penerima dari kalangan pesantren tradisional menghadapi hambatan teknis dalam pemenuhan persyaratan administratif, seperti keabsahan legalitas kelembagaan, dokumen verifikasi pengabdian, hingga syarat kemampuan bahasa asing untuk program internasional seperti Al-Azhar. Akibatnya, hambatan administratif ini berpotensi menggugurkan calon penerima yang secara kualifikasi keilmuan agama memiliki kompetensi memadai.

Permasalahan kedua berfokus pada dinamika akademik dan tata kelola keuangan selama masa studi penerima beasiswa. Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah penerima beasiswa jenjang pascasarjana sebelum penelitian utama dilaksanakan, teridentifikasi bahwa pada jenjang pascasarjana serta program dosen, mayoritas mahasiswa tetap mengemban beban mengajar tinggi atau tugas manajerial di lembaga asal mereka. Dualisme peran ini menciptakan kendala alokasi waktu yang berdampak pada

keterlambatan penyelesaian riset dan kelulusan tepat waktu. Di sisi lain, dari aspek tata kelola keuangan, survei pendahuluan yang sama juga menemukan indikasi ketidaksesuaian antara jadwal penyaluran dana hibah dari Pemerintah Daerah dengan kalender akademik dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal di perguruan tinggi mitra. Keterlambatan pencairan dana mencetuskan beban finansial temporer, baik bagi mahasiswa maupun bagi perguruan tinggi pengelola. Ketimpangan antara perencanaan kebijakan dan realitas operasional yang teridentifikasi pada tahap awal ini menunjukkan perlunya evaluasi ilmiah yang mendalam mengenai efektivitas program, yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian ini.

Guna menganalisis efektivitas pelaksanaan program tersebut secara komprehensif, penelitian ini mengadopsi Teori Efektivitas Program dari Sutrisno Edi (2007). Dalam kerangka administrasi publik dan evaluasi kebijakan, efektivitas tidak hanya diukur dari pencapaian output akhir, melainkan dari seluruh rangkaian proses implementasi program. Sutrisno Edi (2007) merumuskan lima dimensi utama untuk menilai efektivitas program. Pertama, Pemahaman Program, yang mengukur sejauh mana sosialisasi, aturan teknis, dan tujuan program dipahami oleh pelaksana maupun sasaran. Kedua, Ketepatan Sasaran, yang menilai kesesuaian antara penerima manfaat aktual dengan kriteria populasi target yang ditetapkan dalam regulasi. Ketiga, Ketepatan Waktu, yang menguji ketepatan eksekusi tahapan seleksi, penyaluran dana, dan masa studi. Keempat, Tercapainya Tujuan, yang mengukur rasio keberhasilan program dalam memenuhi target kuantitatif dan kualitatif. Kelima, Perubahan Nyata, yang mengevaluasi dampak langsung berupa peningkatan kapasitas akademik, profesionalisme, dan kontribusi alumni terhadap lembaga asal.

Meskipun kerangka Sutrisno Edi (2007) tetap relevan sebagai instrumen ukur efektivitas program, kajian implementasi kebijakan kontemporer memperluas perspektif ini dengan menekankan koordinasi antaraktor dan dinamika wacana kebijakan. Pendekatan Social Network Theory menelaah keberhasilan implementasi kebijakan melalui aspek kontak, kepercayaan, pembagian informasi, dan pertukaran sumber daya antaraktor jaringan (Arrang et al., 2024). Studi implementasi kebijakan ketahanan pangan di Papua Barat menemukan bahwa koordinasi antaraktor yang lemah menjadi penyebab utama rendahnya efektivitas program berbasis jaringan (Arrang et al., 2024). Perspektif lain, Discursive Institutionalism, menunjukkan bahwa penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran sangat dipengaruhi oleh kesenjangan wacana antara penyelenggara kebijakan dan masyarakat sasaran (Kuswandoro, 2023). Kedua perspektif ini melengkapi kerangka Sutrisno Edi (2007) dengan menegaskan bahwa efektivitas program afirmatif seperti Beasiswa LPPD tidak semata ditentukan oleh pemenuhan indikator administratif, tetapi juga oleh kualitas koordinasi kelembagaan dan kesesuaian wacana kebijakan dengan realitas sosial pesantren tradisional.

Penerapan dimensi Sutrisno Edi (2007), yang diperkaya perspektif implementasi kebijakan kontemporer di atas, memberikan instrumen analisis yang sistematis untuk membedah kinerja tata kelola Beasiswa LPPD Jawa Timur. Kerangka gabungan ini memungkinkan peneliti mengisolasi titik-titik penyumbat dalam rantai implementasi kebijakan, mulai dari fase sosialisasi awal hingga dampak jangka panjang bagi komunitas pesantren. Dengan demikian, kerangka teoritis ini berfungsi sebagai alat ukur tingkat efektivitas sekaligus pisau analisis untuk mendeteksi variabel determinan yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi program afirmatif daerah.

Secara empiris, evaluasi terhadap efektivitas program beasiswa publik telah diteliti dalam beberapa studi terdahulu. Christy et al. (2024) menganalisis efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di UPN "Veteran" Jawa Timur dan menemukan bahwa indikator ketepatan sasaran sangat dipengaruhi oleh verifikasi validitas data ekonomi mahasiswa. Mulyana (2023) meneliti penyelenggaraan program beasiswa oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan hasil menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyaluran dana dan koordinasi antarinstansi masih menjadi hambatan utama. Hakim et al. (2024) mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Beasiswa Pancakarsa, yang menekankan pentingnya kepastian regulasi daerah dan konsistensi alokasi anggaran APBD.

Ketiga studi tersebut memiliki kesamaan fokus dengan penelitian ini, yaitu evaluasi efektivitas program beasiswa pemerintah daerah dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan dimensi ketepatan sasaran dan ketepatan waktu. Namun terdapat perbedaan konteks yang mendasar. KIP-K dan Beasiswa Pancakarsa merupakan skema beasiswa umum yang tidak mensyaratkan afiliasi keagamaan atau kelembagaan tertentu. Beasiswa LPPD sebaliknya merupakan skema afirmatif khusus bagi komunitas pesantren dengan mekanisme seleksi berbasis kompetensi keagamaan, seperti tes kitab kuning, dan mengintegrasikan jenjang pendidikan tradisional-keagamaan Ma'had Aly dengan pendidikan tinggi formal, termasuk kemitraan internasional dengan Universitas Al-Azhar Kairo.

Kesenjangan literatur ini diperkuat oleh temuan pada kajian tata kelola pesantren kontemporer. Beberapa studi menunjukkan modernisasi manajemen pesantren tengah berlangsung melalui berbagai model. Salah satunya integrasi kurikulum salafiyah dengan kompetensi abad ke-21 (Muhardi, 2025). Model lain berupa tata kelola terintegrasi yang menggabungkan pendidikan, manajemen profesional, dan kemandirian ekonomi (Muslim et al., 2026). Ada pula kepemimpinan visioner berbasis nilai lokal yang menekankan penempatan sumber daya manusia strategis (Hamdanah et al., 2025). Studi lain menegaskan bahwa modernisasi pesantren dapat dilakukan tanpa mengorbankan tradisi apabila dikelola sebagai proses organisasi yang adaptif dan berbasis negosiasi kurikulum bersama (Abdillah & Inayati, 2025). Temuan serupa turut dikonfirmasi pada konteks pesantren yang menghadapi tuntutan Era Society 5.0, di mana modernisasi berjalan bertahap tanpa meninggalkan identitas salafiyah (Ningsih et al., 2026). Meskipun demikian, seluruh kajian tersebut berfokus pada tata kelola internal pesantren secara umum dan belum menyentuh aspek pembiayaan pendidikan tinggi berbasis beasiswa afirmatif daerah yang melibatkan kelembagaan lintas sektor seperti LPPD.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur pada titik temu antara dua bidang kajian yang selama ini berkembang terpisah, yaitu evaluasi kebijakan beasiswa publik dan studi tata kelola pesantren modern. Urgensi kajian spesifik terhadap LPPD Jawa Timur terletak pada karakteristik unik program ini sebagai skema beasiswa daerah yang mengintegrasikan jenjang pendidikan tradisional-keagamaan, perguruan tinggi negeri atau swasta domestik, dan perguruan tinggi luar negeri di bawah satu lembaga pengelola tunggal. Karakteristik ini menuntut kerangka evaluasi yang mampu menangkap kompleksitas lintas jenjang dan lintas kelembagaan yang tidak tercakup dalam studi beasiswa publik umum sebelumnya.

Berdasarkan kesenjangan ilmiah dan fenomena empiris tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Program Beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan lima dimensi Sutrisno Edi (2007) yang diperkaya perspektif implementasi kebijakan kontemporer. Selain itu,

penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi ketercapaian program. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur evaluasi kebijakan publik di bidang pendidikan afirmatif, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi berbasis data bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pengelola LPPD dalam mengoptimalkan tata kelola program beasiswa di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif guna mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam fenomena efektivitas pelaksanaan Program Beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga November 2025 di Kantor LPPD Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Kompleks Islamic Center Surabaya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada perannya sebagai pusat administrasi, verifikasi, dan koordinasi operasional program beasiswa keagamaan di tingkat provinsi.

Penentuan sumber data dilakukan secara purposive untuk memastikan keterandalan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Pemilihan purposive dalam penelitian ini didasarkan pada tiga kriteria utama. Pertama, informan terlibat langsung dalam pelaksanaan, pengelolaan, atau penerimaan Program Beasiswa LPPD. Kedua, informan memiliki posisi atau pengalaman yang relevan untuk merepresentasikan perspektif kelembagaan maupun perspektif penerima manfaat. Ketiga, informan bersedia diwawancarai secara mendalam. Kriteria ini merujuk pada kerangka pemilihan sampel purposive yang menekankan keselarasan antara karakteristik partisipan dengan tujuan penelitian, sehingga sampel yang terpilih mampu memberikan kedalaman informasi yang dibutuhkan (Ahmad & Wilkins, 2025; Campbell et al., 2020).

Subjek penelitian terdiri dari 12 orang informan kunci sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Subjek tersebut meliputi satu Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, satu Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat, dua staf Bidang Pendidikan Diniyah, serta delapan orang penerima Program Beasiswa LPPD Jawa Timur. Kedelapan penerima tersebut berasal dari berbagai perguruan tinggi mitra dan mewakili variasi jenjang studi, termasuk jenjang doktoral.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	1
2	Wakil dari Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur	1
3	Staf Bidang Pendidikan Diniyah	2
4	Penerima Program Beasiswa LPPD Jatim	8
Jumlah		12

Sumber: data dari author

Instrumen wawancara disusun dalam bentuk pedoman wawancara semi-terstruktur yang dikembangkan untuk empat kategori informan pada Tabel 1 sesuai posisi dan perannya masing-masing, dengan pertanyaan yang disusun berdasarkan lima dimensi efektivitas Sutrisno Edi (2007). Pedoman wawancara lengkap disajikan pada Lampiran.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk mengamati secara langsung

mekanisme pelayanan publik, proses verifikasi berkas, serta dinamika operasional di kantor sekretariat LPPD. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan untuk menggali informasi terperinci mengenai implementasi lima dimensi efektivitas program, kendala teknis di lapangan, hingga persepsi penerima manfaat. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis regulasi pendukung seperti Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 dan 43 Tahun 2023, pedoman petunjuk teknis beasiswa, data statistik jumlah penerima beasiswa periode 2023 sampai 2025, serta arsip pelaporan kinerja program.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan pengujian kesimpulan. Pada tahap reduksi data, seluruh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen diklasifikasikan serta difokuskan sesuai indikator lima dimensi efektivitas Sutrisno Edi (2007). Data yang telah terorganisir kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memperlihatkan hubungan antarvariabel penelitian.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi berfungsi memvalidasi temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan perspektif, sehingga memperkuat kredibilitas hasil penelitian, terutama pada kajian berbasis kebijakan publik yang memerlukan kehati-hatian dalam menafsirkan data empiris lintas epistemologi (Hanson-DeFusco, 2023). Penelitian ini juga memenuhi empat kriteria keabsahan data kualitatif, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sebagaimana kerangka yang banyak diadopsi dalam kajian metodologi kualitatif kontemporer (Kakar et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur

Evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Program Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur dianalisis secara mendalam menggunakan kerangka Teori Efektivitas Program dari Sutrisno Edi (2007). Pengukuran efektivitas ini mencakup lima dimensi utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, serta perubahan nyata. Berdasarkan hasil temuan di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Kantor LPPD Provinsi Jawa Timur, secara umum implementasi program beasiswa ini telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi dalam mendukung pengembangan kualifikasi akademik di lingkungan pesantren. Kendati demikian, pencapaian pada masing-masing dimensi menunjukkan variasi dinamika operasional yang membutuhkan penyesuaian tata kelola secara berkelanjutan.

Pada dimensi pemahaman program, hasil penelitian mengindikasikan bahwa alur informasi dan pemahaman regulasi oleh para pemangku kepentingan serta calon penerima beasiswa berada pada kategori efektif. Pengelola LPPD Provinsi Jawa Timur secara terstruktur menyebarkan informasi melalui kegiatan sosialisasi langsung, pembekalan teknis bagi calon peserta, dan pemanfaatan media digital secara transparan melalui portal resmi lppdjatim.org. Ketersediaan petunjuk teknis yang dapat diakses publik ini memudahkan calon pendaftar dalam memahami kualifikasi, tahapan seleksi, serta hak dan kewajiban penerima hibah beasiswa.

"Pembekalan terkait pemahaman program Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Jawa Timur merupakan aspek penting yang harus dilakukan untuk

mengetahui efektivitas pelaksanaan program beasiswa tersebut. Pembekalan ini juga merujuk pada informasi mengenai tujuan, mekanisme, persyaratan, hak dan kewajiban penerima, serta tahapan pelaksanaan beasiswa agar para calon penerima dapat memahami dengan baik" (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra, 1 September 2025).

"Pembekalan program ini akan disampaikan melalui berbagai bentuk media mulai dari sosialisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui pertemuan koordinasi dengan pengelola pesantren, penyampaian informasi melalui laman resmi dan media sosial LPPD, serta pedoman teknis pelaksanaan beasiswa" (Wawancara dengan Wakil Biro Kesejahteraan Rakyat, 4 September 2025).

"Para calon penerima sangat menunggu mengenai pembekalan ini karena pembekalan informasi dapat mempermudah untuk memahami komitmen akademik dan moral yang melekat pada program Beasiswa LPPD Jawa Timur. Dan juga melalui pembekalan ini, calon penerima dapat mengetahui dan memahami mengenai mekanisme teknis beasiswa, dan juga timeline pelaksanaan beasiswa agar kami para penerima dapat mempersiapkan diri untuk mendaftar" (Wawancara dengan Zahro Yulistia, penerima Beasiswa LPPD, 6 Oktober 2025).

Meskipun demikian, dinamika di lapangan menunjukkan bahwa calon pendaftar dari institusi pesantren tradisional masih membutuhkan proses pendampingan yang lebih intensif guna memahami regulasi administrasi berbasis digital yang ditetapkan oleh panitia seleksi. Dimensi kedua, yaitu ketepatan sasaran, menunjukkan bahwa distribusi bantuan hibah beasiswa ini telah secara konsisten menjangkau populasi target yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 dan Nomor 43 Tahun 2023. Penerima manfaat program dialokasikan secara spesifik bagi tiga entitas utama ekosistem pesantren, yaitu santri, guru madrasah diniyah, dan dosen perguruan tinggi berbasis pesantren. Verifikasi faktual yang ketat dan penetapan syarat administratif, seperti surat rekomendasi dari pengasuh pesantren serta bukti pengabdian kelembagaan, menjadi mekanisme kontrol efektif untuk memfilter calon peserta agar bantuan tidak salah sasaran.

"Program Beasiswa LPPD Jawa Timur ini dirancang untuk memberdayakan santri, guru madrasah diniyah, dan tenaga pendidik pesantren melalui pendidikan tinggi yang berkualitas di PTKI mitra dan Al-Azhar Mesir. Seleksi ketat meliputi verifikasi administrasi, ujian internal PTKI, dan tes kitab kuning khas pesantren seperti Fathul Qorib atau Mu'in memastikan penerima adalah calon sarjana, magister, atau doktor yang berkomitmen mengabdikan di lingkungan pesantren Jatim" (Wawancara dengan Wakil Biro Kesejahteraan Rakyat, 4 September 2025).

Tingkat ketepatan sasaran ini juga diperkuat oleh bukti kuantitatif yang menunjukkan tren peningkatan jumlah penerima beasiswa secara signifikan selama tiga tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Jumlah Penerima Program Beasiswa LPPD Jatim Tahun 2023–2025

Jenjang Beasiswa	2023	2024	2025
S-1 (Sarjana)	310	380	460
S-2 (Magister)	121	255	225
S-3 (Doktor)	30	50	40
Jumlah	461	685	725

Sumber: Database LPPD Jatim, 2023–2025

Berdasarkan tabel 2 tersebut, jumlah total penerima meningkat konsisten dari 461 orang pada 2023 menjadi 685 orang pada 2024 dan 725 orang pada 2025. Jenjang S-1 menunjukkan pertumbuhan paling stabil, meningkat dari 310 menjadi 460 penerima dalam tiga tahun, mengindikasikan prioritas LPPD pada penguatan basis pendidikan sarjana bagi kalangan pesantren. Jenjang S-2 mengalami lonjakan tajam dari 121 menjadi 255 penerima pada 2024, namun menurun menjadi 225 pada 2025, yang kemungkinan mencerminkan penyesuaian kuota anggaran tahunan. Jenjang S-3 tetap menjadi kategori dengan penerima paling sedikit, bergerak dari 30 menjadi puncaknya 50 penerima pada 2024 lalu menurun ke 40 pada 2025, konsisten dengan sifat pendidikan doctoral yang membutuhkan seleksi lebih ketat dan durasi studi lebih panjang. Rincian sebaran penerima 2025 menurut lembaga mitra turut menunjukkan pola alokasi yang merata, dengan kuota jenjang S-1 dialokasikan secara seragam sebanyak 20 orang per lembaga di 23 perguruan tinggi mitra, kuota S-2 sebanyak 15 orang per lembaga di 15 perguruan tinggi, dan kuota S-3 sebanyak 10 orang per lembaga di 4 perguruan tinggi. Pola alokasi yang seragam per lembaga ini mengindikasikan bahwa LPPD menerapkan prinsip pemerataan distribusi kuota lintas wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga memperkuat argumen ketepatan sasaran program secara geografis maupun kelembagaan.

"Bagi saya program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi motivasi bagi saya selaku generasi muda untuk terus berprestasi. Dengan penyaluran beasiswa LPPD yang tepat sasaran ini menjadi wujud nyata upaya pemerintah bagi kami yang menempuh pendidikan keislaman bahwa pemerintah telah sukses dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga kami bisa bersaing dalam dunia global" (Wawancara dengan Farham, penerima Beasiswa LPPD asal IAIN Pamekasan, 9 Oktober 2025).

Pada dimensi ketepatan waktu, penelitian ini menemukan adanya dualisme kinerja antara tahapan seleksi dan proses penyaluran dana. Pada aspek tahapan seleksi, jadwal pendaftaran, ujian komprehensif, hingga pengumuman kelulusan umumnya berjalan tepat waktu sesuai dengan kalender kegiatan yang telah disosialisasikan. Namun, pada aspek alokasi dan pencairan dana hibah beasiswa, masih ditemukan kendala ketersesuaian jadwal pada beberapa periode anggaran, yang menyebabkan keterlambatan pencairan dibandingkan dengan jadwal pembayaran Uang Kuliah Tunggal di perguruan tinggi mitra dan memicu kendala finansial sementara bagi mahasiswa maupun pihak pengelola.

"Seluruh informasi terkait jadwal, ketentuan, dan tahapan seleksi akan disampaikan secara jelas dan detail melalui website resmi, sehingga peserta dapat mempersiapkan diri mulai hingga sekarang agar dapat optimal dalam mengikuti proses pendaftaran" (Wawancara dengan Staf Bidang Pendidikan Diniyah LPPD, 9 September 2025).

"Menurut saya pelaksanaan beasiswa yang dilakukan oleh pihak LPPD Jawa Timur sudah terlaksana dengan tepat waktu sehingga bagi kami selaku penerima merasa bahwa LPPD Jawa Timur sudah menunjukkan keseriusan dan profesionalisme dalam mengelola program beasiswa ini. Kami juga sangat merasa terbantu karena dalam pelaksanaannya kami tidak mengalami kendala berarti mulai dari proses administrasi maupun penyaluran bantuan" (Wawancara dengan Faisol, penerima Beasiswa LPPD asal IAI Al Khairat Pamekasan, 9 Oktober 2025).

"Kejelasan waktu pendaftaran awal hingga batas akhir pengunggahan berkas di tahun 2025 sudah sesuai dengan timeline yang diberikan sehingga kami peserta merasa aman dan memiliki kepastian dalam mengikuti seluruh tahapan proses. Diharap ditahun ini pun

timeline dapat sesuai dan tepat waktu sesuai timeline pendaftaran" (Wawancara dengan Fathir Rotib, pendaftar Beasiswa LPPD, 9 Oktober 2025).

Pada dimensi tercapainya tujuan, Program Beasiswa LPPD terbukti berhasil mencapai target strategis dalam memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan bagi masyarakat pesantren. Program ini tidak hanya membuka kesempatan studi pada jenjang S1, S2, dan S3 di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam negeri, tetapi juga menjangkau jenjang pendidikan khas pesantren yaitu Ma'had Aly, serta kemitraan internasional dengan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Keberhasilan perluasan akses ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan kompetensi akademik, metodologis, dan literatur keilmuan para mahasiswa.

"LPPD Jatim telah sukses mewujudkan tujuannya melalui pemberdayaan santri via beasiswa, karena sudah menghasilkan ribuan lulusan berkualitas yang mengabdikan di pesantren dan masyarakat. Capaian ini sejalan dengan visi lembaga untuk menciptakan pendidikan Islam modern yang kompetitif secara global" (Wawancara dengan Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro Kesra, 1 September 2025).

"Lebih dari 1.193 santri Jatim telah menempuh S1 sampai S3 di PTKI, Al-Azhar, dan Ma'had Aly hingga 2025, dengan tiga penerima baru raih doktor UINSA serta sembilan wisuda Juli 2025. Pada 2024, 823 beasiswa disalurkan, termasuk 33 ke Mesir, membuktikan efektivitas program SDM unggul" (Wawancara dengan Wakil Biro Kesejahteraan Rakyat, 4 September 2025).

"Saya sebagai penerima program LPPD Jawa Timur menilai bahwa pelaksanaan program yang dijalankan oleh pihak LPPD Jawa Timur telah sesuai dengan tujuan visi dan misi yang selama ini sudah ditetapkan dan dijadikan acuan. Hal ini kami rasakan melalui program beasiswa yang tidak hanya memberikan dukungan pembiayaan pendidikan, tetapi juga mendorong kami untuk meningkatkan kualitas diri, tanggung jawab, serta komitmen kami agar bisa berkontribusi bagi pembangunan daerah Jawa Timur" (Wawancara dengan Zahro Yulistia, penerima Beasiswa LPPD, 6 Oktober 2025).

Dimensi terakhir, yaitu perubahan nyata, mengukur dampak jangka panjang dari implementasi program terhadap penguatan kapasitas kelembagaan pesantren di Jawa Timur. Keberadaan alumni penerima beasiswa yang telah menyelesaikan studi pascasarjana telah melahirkan jajaran doktor dan magister baru yang kembali ke lembaga asal mereka, aktif mengabdikan, mengajar, serta menduduki posisi strategis dalam kepemimpinan lembaga keagamaan dan perguruan tinggi berbasis pesantren.

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Kiai, pengurus LPPD, dan tim dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur yang telah bekerja keras dan berpartisipasi aktif demi kelancaran dan suksesnya program ini. Kerja keras mereka telah memberikan dampak besar dalam memastikan program ini berjalan dengan baik dan adil" (Wawancara dengan Ketua LPPD Provinsi Jawa Timur, 13 September 2025).

"Sebagai penerima beasiswa LPPD Jawa Timur 2023, saya merasakan adanya perubahan nyata dalam pelaksanaan program beasiswa tahun 2025 ini. Dibandingkan dengan tahun saya dulu, saya merasa bahwa sistem pendaftaran dan seleksi kini lebih jelas dan terstruktur, sehingga menurut saya sangat memudahkan para calon pendaftar dan penerima dalam memahami setiap tahapannya" (Wawancara dengan Amaluddin, penerima Beasiswa LPPD angkatan 2023, 3 November 2025).

"Menurut saya untuk saat ini informasi yang disampaikan oleh pihak LPPD Jatim semakin transparan dan mudah diakses. Serta penyaluran beasiswa saat ini juga sudah dilakukan

lebih tepat waktu, sehingga sangat membantu dalam menunjang kebutuhan pendidikan para penerima" (Wawancara dengan Kiki Yulianto, penerima Beasiswa LPPD, 3 November 2025).

Perubahan nyata ini membuktikan bahwa program beasiswa tidak sekadar memberikan bantuan finansial, melainkan mampu mentransformasi tata kelola dan kualitas pendidikan di ekosistem pesantren Jawa Timur secara berkelanjutan.

Interaksi Kekuatan dan Keterbatasan Struktural Program Beasiswa LPPD

Keberhasilan Program Beasiswa LPPD Provinsi Jawa Timur tidak dapat dipahami sebagai hasil penjumlahan sederhana antara faktor pendukung dan faktor penghambat yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai hasil interaksi timbal balik di mana sumber kekuatan program pada satu dimensi kerap menjadi sumber keterbatasan pada dimensi lain. Ketersediaan payung hukum yang eksplisit melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 dan Nomor 43 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum dan acuan operasional yang stabil, sejalan dengan temuan bahwa kepastian regulasi daerah menjadi determinan utama keberhasilan implementasi program hibah pendidikan pada evaluasi Beasiswa Pancakarsa Kabupaten Bogor (Hakim et al., 2024). Namun kepastian regulasi ini justru menyingkap keterbatasan struktural yang lebih mendasar, yaitu ketimpangan antara skala kuota yang ditetapkan regulasi dengan skala kebutuhan riil komunitas pesantren. Tabel 3 mengilustrasikan disparitas ini secara kuantitatif.

Tabel 3. Perbandingan Skala Kuota LPPD dengan Skala Komitmen Beasiswa Pemprov Jatim Lainnya

Indikator	Nilai
Kuota LPPD Tahun Anggaran 2026	1.100
Akumulasi penerima manfaat LPPD 2019–2026	7.976
Jumlah perguruan tinggi mitra LPPD (PTKIN, PTKIS, Ma'had Aly, PTN, dan Al-Azhar Kairo)	150
Kuota beasiswa dan keringanan biaya Pemprov Jatim untuk SMA/SMK/PTS Tahun Anggaran 2026	143.131

Sumber: LPPD Jatim (2026); Kompas.com (2026); ANTARA News (2026)

Disparitas pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa regulasi yang kuat tidak otomatis berarti kapasitas penyerapan yang memadai. Kuota LPPD hanya sekitar 0,77 persen dari kuota beasiswa umum Pemprov Jatim pada tahun anggaran yang sama, meskipun keduanya sama-sama merupakan komitmen kebijakan resmi berbasis regulasi. Artinya, kepastian hukum menjelaskan mengapa program berjalan konsisten dari tahun ke tahun, tetapi tidak menjelaskan mengapa program tetap terbatas jangkauannya. Penjelasan yang lebih memadai justru datang dari sifat afirmatif program itu sendiri, yaitu keputusan kebijakan untuk menyasar segmen populasi sempit dengan kriteria keagamaan spesifik, alih-alih populasi pelajar secara umum. Pilihan desain kebijakan ini menciptakan trade-off yang melekat sejak awal, antara kedalaman afirmasi terhadap satu komunitas dengan luas jangkauan populasi yang dapat dilayani.

Ketegangan serupa terjadi antara legitimasi sosial program dengan tingkat kompetisi pendaftar. Tingginya antusiasme komunitas pesantren terhadap Beasiswa LPPD dapat dibaca sebagai bukti keberhasilan program menjembatani kesenjangan wacana antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat sasaran, sebagaimana ditekankan dalam kajian partisipasi masyarakat pada kebijakan afirmatif berbasis hibah daerah (Kuswandoro, 2023). Mekanisme seleksi yang mengakomodasi tradisi keilmuan pesantren, seperti pengujian kitab kuning, memperkuat argumen ini karena program tidak memaksakan standar akademik sekuler semata, melainkan menegosiasikan episteme keilmuan pesantren ke dalam kerangka seleksi

formal. Namun justru keberhasilan menjembatani wacana inilah yang kemudian memperbesar jumlah pendaftar, sementara kuota tahunan tetap terbatas sebagaimana tergambar pada Tabel 4.2. Dengan demikian, legitimasi sosial yang tinggi berfungsi ganda, ia adalah indikator keberhasilan program sekaligus pendorong tingkat kompetisi yang pada gilirannya menghasilkan keluhan mengenai keterbatasan kuota.

Pola ketegangan yang sama muncul pada level kelembagaan pesantren penerima. Kemitraan strategis antara LPPD dengan ratusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam serta Universitas Al-Azhar Kairo memperluas jangkauan program tanpa LPPD harus membangun infrastruktur pendidikan tinggi sendiri, namun perluasan jaringan mitra ini turut memperbesar kompleksitas koordinasi administratif yang harus ditanggung pesantren pengirim, khususnya pesantren tradisional yang belum memiliki sistem administrasi terkelola secara modern. Kendala legalitas kelembagaan, verifikasi masa pengabdian, dan prosedur pendaftaran berbasis sistem digital yang dihadapi calon pendaftar bukanlah persoalan kelayakan substantif individu, melainkan konsekuensi dari kesenjangan kapasitas manajerial antara skala kemitraan formal yang dibangun LPPD dengan kapasitas administratif riil sebagian pesantren mitra, pola yang konsisten dengan temuan pada evaluasi program pemberdayaan berbasis komunitas lain di mana keterbatasan kapasitas manajerial lembaga penerima menjadi sumber utama kendala teknis, bukan kegagalan calon penerima secara individual (Priyanto et al., 2020). Implikasinya, intervensi yang tepat sasaran seharusnya diarahkan pada penguatan kapasitas administratif kelembagaan pesantren mitra, bukan sekadar sosialisasi persyaratan kepada calon pendaftar perorangan.

Ketegangan struktural yang paling tajam justru muncul pada persimpangan antara desain program dan tujuan program itu sendiri, terutama pada dua aspek. Pertama, kesenjangan bahasa Arab pada jalur internasional Al-Azhar Kairo mencerminkan benturan episteme antara pendidikan pesantren tradisional yang menekankan penguasaan kitab kuning melalui metode qiroatul kutub dengan standar bahasa Arab modern atau fusha yang digunakan pada perkuliahan formal. Kesenjangan semacam ini bukan kegagalan individu peserta, melainkan konsekuensi struktural dari upaya menjembatani dua sistem pendidikan dengan orientasi keilmuan yang berbeda, dan kajian mengenai adaptasi kurikulum pesantren modern menunjukkan bahwa proses adaptasi semacam ini hanya berjalan efektif ketika dikelola sebagai negosiasi organisasi yang terstruktur, bukan tuntutan administratif satu arah dari lembaga penyelenggara (Abdillah & Inayati, 2025). Kedua, dan lebih fundamental, adalah kontradiksi internal pada persyaratan penerima jenjang pascasarjana, yang mewajibkan status aktif mengabdikan di pesantren asal sebagai syarat kelayakan, namun status aktif mengabdikan itu sendiri menjadi sumber beban ganda yang memperlambat penyelesaian studi. Persyaratan yang dirancang untuk menjamin keberlanjutan pengabdian penerima pascastudi justru berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan lain program, yaitu penyelesaian studi tepat waktu. Kontradiksi semacam ini tidak dapat diselesaikan melalui penambahan anggaran atau perbaikan sosialisasi, melainkan menuntut peninjauan ulang terhadap desain persyaratan program itu sendiri.

Secara keseluruhan, interpretasi terhadap faktor pendukung dan penghambat Beasiswa LPPD menunjukkan bahwa sumber kekuatan program, yaitu kepastian regulasi, legitimasi sosial, dan luasnya jaringan kemitraan, secara struktural juga menjadi sumber keterbatasannya sendiri. Kepastian regulasi menjelaskan konsistensi program tetapi tidak menjelaskan keterbatasan jangkauannya. Legitimasi sosial mendorong partisipasi tetapi turut memperketat kompetisi. Luasnya jaringan kemitraan memperluas akses tetapi memperbesar beban koordinasi

administratif pada level kelembagaan pesantren mitra. Pola ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan afirmatif berbasis pesantren tidak dapat dievaluasi secara linear pada masing-masing dimensi terpisah, melainkan perlu dipahami sebagai rangkaian trade-off yang saling terkait, sehingga rekomendasi kebijakan ke depan perlu menyasar titik-titik ketegangan struktural ini secara spesifik, bukan sekadar penambahan alokasi anggaran secara umum.

KESIMPULAN

Program Beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur secara umum berjalan efektif ditinjau dari lima dimensi Sutrisno Edi (2007). Empat dimensi, yaitu ketepatan sasaran, ketepatan waktu pada tahapan seleksi, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata, tergolong efektif. Satu dimensi, yaitu pemahaman program, tergolong relatif efektif karena distribusi informasi belum sepenuhnya merata menjangkau pesantren tradisional. Program ini terbukti memperluas akses pendidikan tinggi keagamaan pada jenjang S1, S2, S3, Ma'had Aly, hingga Universitas Al-Azhar Kairo, ditandai peningkatan penerima manfaat dari 461 orang pada 2023 menjadi 725 orang pada 2025.

Keberhasilan implementasi didorong oleh kepastian regulasi, komitmen anggaran daerah, legitimasi sosial komunitas pesantren, dan kemitraan institusional yang solid. Namun sumber kekuatan ini juga menjadi sumber keterbatasan program, tergambar dari ketegangan antara kepastian regulasi dengan sempitnya jangkauan kuota, antara legitimasi sosial dengan tingkat kompetisi pendaftar, dan antara persyaratan pengabdian aktif dengan kecepatan penyelesaian studi penerima pascasarjana. Faktor penghambat teknis, seperti kendala administrasi digital pada pesantren tradisional dan variasi kesiapan bahasa Arab untuk jalur Al-Azhar, bersifat dapat dikelola melalui perbaikan mekanisme penyaringan dan pendampingan, sementara ketegangan struktural antara desain persyaratan program dengan tujuan penyelesaian studi tepat waktu memerlukan peninjauan kebijakan yang lebih mendasar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang hanya mencakup satu provinsi sehingga generalisasi temuan ke konteks daerah lain perlu dilakukan secara hati-hati, serta pada jumlah informan penerima yang terbatas sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan variasi pengalaman di seluruh jenjang dan wilayah asal penerima. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan informan lintas kabupaten dan lintas jenjang secara proporsional, serta mengeksplorasi data kuantitatif rasio pendaftar terhadap penerima untuk mengukur tingkat kompetisi program secara lebih presisi.

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan.

Funding

Penelitian ini tidak menerima pendanaan dari pihak mana pun.

AI Usage Statement

Kecerdasan buatan digunakan hanya untuk perbaikan tata bahasa. Substansi dan interpretasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Data Availability

Data penelitian dapat diminta melalui penulis korespondensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S. S. N., & Inayati, N. L. I. (2025). Institutional adaptation through integrated curriculum management and multiple intelligences at a modern Islamic boarding school. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSIAI)*, 6(3), 347–362. <https://doi.org/10.22373/jsai.v6i3.9383>
- Anikina, E., Ivankina, L., & Tumanova, I. (2015). Human well-being and educational investment efficiency. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 166, 48-52. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.481>
- Ahmad, M., & Wilkins, S. (2025). Purposive sampling in qualitative research: A framework for the entire journey. *Quality & Quantity*, 59(2), 1461–1479. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-02022-5>
- ANTARA News. (2026, 19 Juni). *Khofifah luncurkan 143 ribu kuota beasiswa pelajar-mahasiswa Jatim*. <https://www.antaranews.com/berita/5614987/khofifah-luncurkan-143-ribu-kuota-beasiswa-pelajar-mahasiswa-jatim>
- Arrang, R., Sutrisno, S., & Wahyudi, S. (2024). Implementation of food security policy in a network governance perspective: Study at the West Papua Food Security Service. *International Journal of Social Welfare and Family Law*, 1(4), 39–57. <https://doi.org/10.62951/ijsw.v1i4.68>
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661. <https://doi.org/10.1177/1744987120927206>
- Christy, E. N., Latifa, R., Purwatitisari, N., Prabowo, P. A. R., & Harmawan, B. N. (2024). Efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 9(2), 134–141. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v9i2.3059>
- Hakim, I., Subagdja, O., & Salbiah, E. (2024). Efektivitas Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi di Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4).
- Hamdanah, H., Mardia, M., & Rusydi, M. (2025). Visionary leadership in Islamic boarding schools: Implications for institutional management within the Barakka framework. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 24(8), 1041–1057. <https://doi.org/10.26803/ijlter.24.8.46>
- Hanson-DeFusco, J. (2023). What data counts in policymaking and programming evaluation: Relevant data sources for triangulation according to main epistemologies and philosophies within social science. *Evaluation and Program Planning*, 97, 102238. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102238>
- Kakar, Z. U. H., Rasheed, R., Rashid, A., & Akhter, S. (2023). Criteria for assessing and ensuring the trustworthiness in qualitative research. *International Journal of Business Reflections*, 4(2), 150–173. <https://doi.org/10.56249/ijbr.03.01.44>
- Kompas.com. (2026, 11 Juni). *Jatim buka 1.100 beasiswa santri hingga S3 dan Al Azhar Mesir, ini syaratnya*. <https://surabaya.kompas.com/read/2026/06/11/171523178/jatim-buka-1100-beasiswa-santri-hingga-s3-dan-al-azhar-mesir-ini-syaratnya>
- Kuswandoro, W. E. (2023). From reluctance to acceptance: Participation of poor-people in policy implementation using discursive institutionalism. *Jurnal Transformative*, 9(1), 1–21. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2023.009.01.1>

- LPPD Jatim. (2026). *Beranda*. <https://lppdjatim.org/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhardi, M. (2025). Transformation of Islamic boarding school management: Case study at Syaikh Zainuddin NW Bintan Islamic Boarding School. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 8–23. <https://doi.org/10.58577/dimar.v7i1.478>
- Muslim, S. B. P., Solihati, A. T., & Suryandari, M. (2026). Modern Islamic boarding school governance: Institutional management, human resources, economic independence and branding at Al-Zaytun Islamic Boarding School. *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 4(1), 56–79. <https://doi.org/10.71305/jmpi.v4i1.1647>
- Ningsih, S. R. J., Patimah, S., & Murtafiah, N. H. (2026). Management of improving the quality of Islamic boarding school education in the era of Society 5.0 in facing global competition. *Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme*, 8(1).
- Pemerintah Kabupaten Bogor. (2022). *Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 73 Tahun 2022 tentang Beasiswa Pancakarsa*. Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023a). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren*. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2023b). *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pengembangan Pesantren*. Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.
- Priyanto, K. E., Sutrisno, S., & Effendy, M. A. (2020). Health promotion strategies in integrated healthcare program park of public health center. *Jurnal Ners*, 15(2), 563–568. <https://doi.org/10.20473/jn.v15i2.20544>
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen sumber daya manusia*. Kencana Prenada Media Group.
- Tawil, S., Al-Tarawneh, A., & Kasemmohamad, A. (2026). Education and Human Capital Investment as Pillars for Achieving Sustainable Economic Development. In *AI-driven Sustainable Innovation and Sustained Competitive Advantage* (pp. 1527-1540). Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-15459-0_94
- Teixeira, A. A. C., & Gomes, A. C. (2026). Human capital and economic growth: A meta-analytic reassessment. *Journal of Social and Economic Development*. s40847-026-00510-y <https://doi.org/10.1007/s40847-026-00510-y>
- Yugo, T. (2025). Implementation of Minimum Service Standards and Their Contribution to Learning Quality in Madrasah Diniyah Takmiliyah. *Al-Qalam*, 31(1), 107-119. <https://doi.org/10.31969/alq.v31i1.1576>